

Bujang: Hai, Dare! Tahu nggak, temanku itu salah seorang pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) loh.

Dare: Wow, itu menarik! Apa yang akan diperiksa?

Bujang: Mereka akan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dare: Wah, pasti ada banyak dokumen yang harus diperiksa dan diteliti dengan cermat.

Bujang: Iya, mereka akan melakukan audit untuk itu

Dare: Tugas mereka cukup penting. Tapi, apa yang terjadi jika mereka menemukan kesalahan atau ketidakberesan?

Bujang: Biasanya mereka akan menyusun laporan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan langkah perbaikan kepada entitas yang diperiksa.

Dare: Jadi, pemeriksaan ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan Keuangan entitas tersebut.

Bujang: Benar, mereka berperan dalam menjaga integritas dan transparansi keuangan negara.

Dare: Semoga pemeriksaan ini berjalan lancar dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi entitas yang diperiksa.

Bujang: Ya, semoga begitu. Dan semoga temanku dapat berkontribusi dalam proses pemeriksaan dengan baik.

Dare: Tentu, memberikan kontribusi yang baik akan menjadi pengalaman yang berharga baginya dan bermanfaat bagi keuangan negara

Bujang: Terima kasih, Dare! Aku akan mendoakan yang terbaik untuknya.

Dare: Sama-sama! Tentunya hasil pemeriksaan di BPK dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan negara dan daerah.

RENUNGAN

“NAK, TIDAK ADA KEBERHASILAN YANG DIPEROLEH SECARA TIBA-TIBA. KEBERHASILAN HANYA AKAN DIPEROLEH SECARA BERTAHAP YANG DIAWALI DENGAN NIAT DAN MOTIVASI YANG KUAT, DILAKUKAN DENGAN KREATIF DAN KESUNGGUHAN, DAN DIAKHIRI DENGAN MEMOHON PERTOLONGAN KEPADANYA”

- Buku 1001 Nasihat Simbah (Wahyu Priyono)

Tips Untuk Menghilangkan Rasa Kantuk Dan Lelah Saat Bekerja

Jangan biarkan rasa kantuk dan lelah menguasai, perkuat semangat dan energi.

Gerakkan tubuh, istirahat sejenak, dan kembali bekerja dengan penuh semangat tak tergoyahkan.

Rasa kantuk sering terjadi pada jam-jam rawan, misalnya setelah makan siang. Mengantuk saat bekerja dapat mengganggu produktivitas dan membuat pikiran menjadi buyar.

Kondisi ini bisa berasal dari berbagai masalah, misalnya kesehatan fisik, tubuh yang dehidrasi, makan yang kekenyangan dan masih banyak lagi penyebab lainnya. Dilansir dari Halodoc.com, ada 7 cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kantuk dan lelah secara efektif.

1. Minum Secangkir Kafein
2. Tidur Siang Sejenak
3. Berjalan-jalan Sebentar
4. Stretching
5. Dengarkan Musik
6. Cuci Muka
7. Konsumsi Cemilan



Redaksi ...

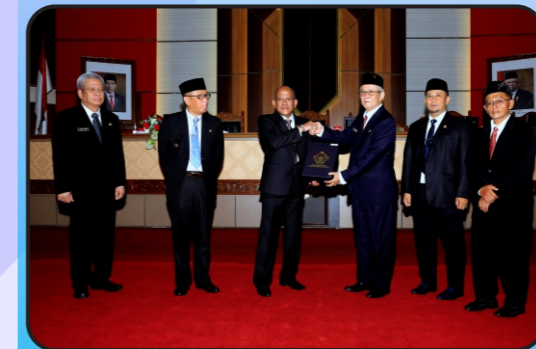
Pengarah: Wahyu Priyono **Penanggung Jawab:** Maksum **Pemimpin Redaksi:** Mochammad Imam Asyari, **Anggota:** Desak Putu Dwiaryani, Ai Nurcahyani, Kusbianto, Gabriella Simarmata, Tri Pratondo Aryawan

Alamat Redaksi: Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat 78124, Telepon: 0561 585349, Website: <http://kalbar.bpk.go.id>.
Redaksi menerima tulisan dan foto dari pembaca. Kirim karya anda ke Redaksi Kabar Kalbar melalui email: bpkpontianak@gmail.com



Berita Utama

Anggota VI BPK Serahkan LHP atas LKPD TA 2022 dan IHPD pada Pemerintah Provinsi Kalbar



Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar)

pada tanggal 01 Maret 2023. LHP tersebut diserahkan oleh Anggota VI BPK, **Pius Lustrilanang** kepada Ketua DPRD Provinsi Kalbar, **M. Kebing L** dan Gubernur Kalbar, **H. Sutarmidji**. Penyerahan tersebut dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalbar. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Kalbar, **Wahyu Priyono** dan para pejabat struktural BPK Kalbar serta tim pemeriksa LKPD Provinsi Kalbar.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Provinsi Kalbar TA 2022 telah sesuai dengan SAP berbasis Akruar, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan Keuangan telah didukung dengan SPI yang efektif, sehingga BPK menyimpulkan bahwa opini atas LKPD Provinsi Kalbar TA 2022 adalah "Wajar Tanpa Pengecualian" atau "WTP".

Namun, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Kalbar, BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian, yaitu pelaksanaan atas 28 Paket Pekerjaan pada 4 SKPD tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp2,54 Milyar, pengelolaan aset tetap dan aset lainnya belum tertib, serta aset yang tidak ditemukan keberadaannya maupun tidak teridentifikasi serta aset yang belum tercatat pada Kartu Inventaris Barang, pemanfaatan dan penggunaan aset tetap dan aset lainnya belum tertib dan tidak sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun opininya sudah WTP, namun tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalbar.

Anggota VI BPK berharap pada tahun 2023 ini, Pemerintah Provinsi Kalbar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekan tingkat pengangguran, serta salah satu yang harus digarisbawahi, bahwa pencapaian Opini "WTP" pun akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalbar belum tercapai. Anggota VI BPK, mengingatkan agar rekomendasi yang diberikan oleh BPK segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalbar beserta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dari Redaksi

Salam hangat dari redaksi Buletin Info BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan kalian sebagai pembaca setia buletin ini. Dengan hati yang terbuka, kami mengajak pembaca untuk menikmati buletin ini dengan pesan dan informasi yang disajikan. Awal Januari 2023 diperingati peristiwa HUT BPK RI ke-76, BPK Perwakilan Kalimantan Barat ikut menyemarakkan ulang tahun dengan melaksanakan upacara, mengadakan tasyakuran, pembagian santunan, perlombaan, serta kegiatan donor darah. Pada 20 Februari 2023, BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat mendapatkan piagam penghargaan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bertempat di Aula Badiklat BPK RI. Berkat kerja keras dan dedikasinya, tercipta prestasi yang baik sebagai langkah awal menuju masa depan yang lebih gemilang dan sukses. Selanjutnya, pada Maret 2023 Pemerintah dari seluruh Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan LKPD Unaudited kepada BPK. BPK Kalbar akan menindaklanjutinya dengan segera menugaskan tim pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah. Selamat membaca!

Salam Redaksi

Daftar Isi

Han Redaksi

Peringatan Hari Ulang Tahun BPK RI Ke-76 Tahun 2023 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ke-76 pada tahun 2023 mengambil tema **"MAKIN KUAT MAKIN HEBAT"**. Perwakilan Kalimantan Barat melaksanakan upacara yang diikuti oleh seluruh pegawai dan Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Barat, **Wahyu Priyono** sebagai inspektur upacara.

Kepala Perwakilan membacakan Pidato dari Ketua BPK RI, **Dr. Isma Yatun, CSFA., CfrA.** Dalam Pidatonya Ketua BPK menyampaikan tentang capaian selama 76 tahun usia BPK RI bahwa di tengah lajunya era teknologi informasi, BPK telah membangun *Digital Enterprise Architecture* (DNA) BPK untuk pemetaan proses bisnis, BPK untuk pemetaan proses bisnis, *BPK General Office Automation* (BPK GO) untuk integrasi dan kemudahan akses semua aplikasi di BPK, serta pengembangan *Big Data Analytics* (BIDICS) untuk mendukung pelaksanaan tugas melalui transformasi digital.

Tahun 2022 juga menjadi momentum peningkatan kapasitas melalui Kerjasama Internasional dengan menginisiasi pembentukan Supreme Audit Institution 20 (SAI20) sebagai new engagement group G-20 dan terpilihnya BPK sebagai *Chair of United Nations Panel of External Auditors*, sebagai satu panel pemeriksa eksternal *United Nations, Specialized Agencies and International Atomic Energy Agency.*

Puncak peringatan acara HUT BPK RI ke-76 Tahun 2023 diadakan pada tanggal 19 Januari 2023. Acara dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan, Wahyu Priyono diawali dengan pemotongan tumpeng yang disaksikan oleh para pejabat struktural dan pejabat pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Acara selanjutnya diisi dengan pembagian santunan kepada para Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan OB, acara hiburan yang menampilkan TEGAS Band dan permainan fun games. Acara ditutup dengan foto bersama dan diakhiri dengan ramah tamah, pembagian doorprize, dan hiburan yang dibawakan oleh masing-masing perwakilan pegawai dari subauditorat, sekretariat dan pegawai tidak tetap.

Galery Foto HUT BPK RI ke-76



BPK Kalimantan Barat Raih Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)



Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat turut serta dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Salah satu keberhasilan dalam pembangunan Zona Integritas adalah capaian predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diperoleh BPK Kalimantan Barat tahun 2023.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Atas pencapaian tersebut, Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CfrA memberikan secara langsung sertifikat penghargaan predikat WBK kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, Wahyu Priyono. Acara pemberian Sertifikat Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diselenggarakan pada Senin, 20 Februari 2023 bertempat di Aula Badiklat BPK RI.



Kepala Perwakilan Terima Kunjungan Ombudsman Kalimantan Barat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerima kunjungan dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat beserta jajarannya yang dipimpin oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat, Tariyah pada hari Senin, 9 Januari 2023. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Kalbar, Wahyu Priyono didampingi Kepala Perwakilan yaitu Kepala Sekretariat Perwakilan, Maksum dan Kepala Subbagian Humas dan TU Kalan, Mochammad Imam Asyari di Ruang Tamu Kepala Perwakilan.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat, Tariyah menyampaikan bahwa kunjungan ini dilaksanakan sehubungan dengan baru dilantikannya Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalbar, sehingga ingin memperkenalkan diri, bersilaturahmi serta menjalin koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang baik dalam menjalankan tugasnya dan fungsi masing-masing instansi dan lembaga terkait, tidak terkecuali dengan BPK Kalbar. Oleh karena itu, lebih lanjut dijelaskan bahwa diperlukan adanya koordinasi yang aktif antar sesama lembaga.



Dalam kunjungan dan silaturahmi yang berlangsung hangat, Kepala Perwakilan BPK Kalbar menyambut baik maksud dan tujuan kedatangan dari Ombudsman RI Provinsi Kalbar. Kepala Perwakilan BPK Kalbar berharap sinergi dan kerjasama yang telah berlangsung selama ini agar tetap terjalin dengan baik dan dipertahankan untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai penutup, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat, menyampaikan harapannya agar apa yang diperoleh dari kunjungannya ke BPK Kalbar kali ini akan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat dalam melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat

Pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Interim TA 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat oleh BPK Kalbar



Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Barat (BPK Kalbar), **Wahyu Priyono**, bersama dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, **Sutarmidji**, melakukan kegiatan entry meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran (TA) 2022 pada hari Selasa, 31 Januari 2023, yang bertempat di Ruang Praja I Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Acara entry meeting tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, **Harisson**, Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, **Marlyna**, Kepala Subauditorat Kalbar I, **Yudi Prawiratman**, Pengendali Teknis Pemeriksaan Interim, **Guruh Rahmadi Prakoso**, Tim Pemeriksaan Interim TA 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalbar, serta jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan pemerintah daerah yang akan diperiksa. Dengan adanya, kesamaan persepsi dapat terwujud dalam proses dan pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan interim pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kali ini merupakan tahap kedua pemeriksaan interim dalam rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 yang akan dilaksanakan selama 30 hari (31 Januari–1 Maret 2023).

Kepala Perwakilan BPK Kalbar mengimbau agar LKPD Unaudited dapat diselesaikan dan diserahkan kepada BPK maksimal pada minggu kedua bulan Maret 2023. Entry meeting menjadi salah satu tahap penting yang dapat memengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Hal tersebut karena perolehan data dan informasi dari hasil pemeriksaan interim akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan terinci setelah LKPD diserahkan kepada BPK untuk menghasilkan opini yang sesuai dan berkualitas.

Dharma Wanita Persatuan BPK Kalbar Serahkan Dana Bantuan Pendidikan Murid

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) melaksanakan penyerahan Bantuan Pendidikan Murid kepada putra-putri para pegawai tidak tetap dan *cleaning service* (CS) kantor BPK Kalbar yang masih menempuh pendidikan di bangku sekolah pada hari Rabu, 11 Januari 2023.



Acara ini dilaksanakan secara tatap muka bertempat di Ruang Rapat Pimpinan BPK Kalbar dan dihadiri oleh seluruh anggota DWP BPK Kalbar baik para istri pegawai, pegawai Wanita BPK Kalbar, para Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan CS beserta anak-anak mereka.

Acara dimulai dengan sambutan dari Ibu Kepala Perwakilan selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPK Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, Ketua DWP BPK Kalimantan Barat, **Titin Wahyu Priyono** menyampaikan bahwa Bantuan Pendidikan Murid merupakan amanah dari IKISTRA dan Dharma Wanita Sekretariat Jenderal BPK yang diserahkan kepada Perwakilan Seluruh Indonesia untuk diserahkan kepada PTT dan CS untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.

Kemudian sambutan Kepala Perwakilan selaku Pembina DWP BPK Kalbar, **Wahyu Priyono** menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima bantuan pendidikan dan berpesan agar bantuan pendidikan murid dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu kegiatan meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat meringankan biaya operasional sekolah sehari-hari.



Pada akhir acara, Ketua DWP BPK Kalimantan Barat, **Titin Wahyu Priyono** menyerahkan bantuan pendidikan kepada 32 orang anak, yang terdiri dari 19 anak SD, 9 anak SMP, 4 anak SMA dan acara ditutup dengan sesi foto bersama seluruh hadirin serta ramah tamah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serahkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2022 ke BPK Kalbar



Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar), **Wahyu Priyono** selaku Kepala Perwakilan BPK Kalbar menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 dari Gubernur Kalimantan Barat, pada Rabu (01/03/2023). Penyerahan LKPD Unaudited TA 2022 tersebut, didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima antara Gubernur Kalimantan Barat dan Kepala Perwakilan BPK Kalbar. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat dan sambutan dari Gubernur Kalimantan Barat, **Sutarmidji**.

Dalam sambutannya, Kepala perwakilan menyampaikan bahwa dari seluruh provinsi yang berada di wilayah kerja Auditorat Keuangan Negara VI BPK RI, Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi pertama yang menyerahkan LKPD Unaudited kepada BPK. Kepala Perwakilan juga berharap bahwa LKPD Unaudited yang langsung diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, yang didampingi oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Setelah menerima LKPD Unaudited dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, BPK Kalbar akan segera memulai pemeriksaan terinci atas laporan keuangan daerah yang akan dilaksanakan pada awal bulan Maret.

Lima Pemerintah Daerah serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun Anggaran 2022 ke BPK Kalbar

Jumat 10 Maret 2023, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menerima lima Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2022 dari Pemerintah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, dan Pemerintah Kota Singkawang bertempat di Ruang Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Laporan Keuangan Unaudited TA 2022 diserahkan oleh Bupati Sanggau, **Paolus Hadi**, Bupati Sambas, **Satono**, Wakil Bupati Ketapang, **Farhan**, Wakil Bupati Melawi, **Kluisen**, dan Pj. Walikota Singkawang, **Sumastro** diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Kalbar, **Wahyu Priyono**, yang didampingi Kepala Subauditorat Kalbar I, **Yudi Prawiratman**, Kepala Subauditorat Kalbar II, **Heribertus Kurniawan**, Kepala Sekretariat Perwakilan, **Maksum**, serta beberapa Pejabat struktural dari masing-masing entitas, Pengendali Teknis Pemeriksaan Interim didampingi Ketua Tim Pemeriksaan Interim dari lima entitas.



Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited TA 2022 didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Perwakilan BPK Kalbar dan sambutan Perwakilan Kepala Daerah yang disampaikan oleh Bupati Sanggau, Paolus Hadi. Dengan telah diterimanya Laporan Keuangan Unaudited dari Pemerintah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi dan Pemerintah Kota Singkawang, maka BPK Kalbar akan menindaklanjutinya dengan segera menugaskan tim pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah.

Pengarahan Anggota III BPK RI kepada Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI, **Achsanul Qasasi** selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, yang didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, **Ahmad Adib Susilo**, dan Kepala Auditorat III, **B.Triyantoro** melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat pada 2 Maret 2023. Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Kepatuhan Pengelolaan Tata Ruang dan Layanan Pertanahan Tahun 2021-2022 kepada Kementerian ATR/BPN. Selain itu, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI, **Achsanul Qasasi** selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III berkunjung ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) untuk memberikan pengarahan internal kepada pegawai BPK Kalbar. Kedatangan Anggota III beserta rombongan disambut hangat oleh Kepala Perwakilan BPK Kalbar, pejabat struktural, dan pejabat fungsional pemeriksa di lingkungan BPK Kalbar.



Kepala Perwakilan BPK Kalbar, **Wahyu Priyono** menyampaikan rencana renovasi dan pembangunan Masjid Baitul Hasib yang akan dilaksanakan di BPK Kalbar. Anggota III BPK menyambut baik rencana tersebut dan berharap masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah melainkan juga tempat menjalin silaturahmi.

Anggota III BPK juga memberikan pengarahan yang berisi antara lain terkait penilaian performance kerja para pegawai BPK RI serta peran pemeriksa untuk menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Anggota III BPK menuturkan bahwa penilaian dan analisis performance terhadap para pegawai BPK harus dilakukan secara objektif terutama untuk menentukan promosi dan rotasi.

Anggota III BPK juga mengingatkan para pegawai BPK Kalbar mengenai visi BPK, yaitu "Mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara". Untuk mewujudkan visi tersebut, pemeriksa harus mampu memberikan solusi atas temuan pemeriksaan. "Auditor bukan mencari salah tetapi mengkonfirmasi kebenaran. Jika (auditor) menemukan kesalahan, kasih tahu cara memperbaikinya," jelas Anggota III BPK. Dengan memberikan rekomendasi yang solutif, para pemeriksa dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas dan bermanfaat melalui pemeriksaan yang dilakukan. Anggota III BPK mengimbau para pegawai agar terus menjaga nilai-nilai dasar BPK dalam melaksanakan pekerjaan. Acara pengarahan tersebut ditutup dengan kegiatan foto bersama.

BPK Perwakilan Kalimantan Barat menerima Audiensi Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Barat Gerakan Nasional Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (GN-PK)



Kepala Perwakilan, **Wahyu Priyono** didampingi Kepala Sekretariat Perwakilan, **Maksum** dan Kepala Subbagian Humas dan TU Kalan, **Mochammad Imam Asyhari**, serta Kepala Subbagian Hukum, **Yuana Dwiarta** menerima Audiensi dari rombongan Dewan Pimpinan Provinsi Kalimantan Barat Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK) di Pontianak, pada 4 April 2023.

Ketua GN-PK Kalbar, **Muhammad Rifal** menyampaikan bahwa maksud dan tujuan audiensi kali ini yaitu untuk menyambung tali silaturahmi serta menyampaikan program kerja GN-PK Kalbar dalam pencegahan tindak pidana korupsi dari kepengurusan yang baru terbentuk.

Kepala Perwakilan dalam sambutannya menyampaikan tentang tugas dan fungsi BPK

Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yaitu diantaranya memeriksa pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD baik itu tingkat provinsi, kota maupun kabupaten

Pemotongan Hewan Qurban dalam Rangka Hari Raya Idul Adha 1444 H di Lingkungan BPK Kalimantan Barat



Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Shalawat dan salam kepada suri tauladan kita, Rasulullah

Muhammad SAW, keluarga para sahabat dan umatnya hingga yaumul akhir. Rasulullah menegaskan bahwa ibadah individual tidak akan bermakna bila pelakunya melanggar norma-norma kesalehan sosial. "Tidak beriman kepadaku orang yang tidur kenyang, sementara tetangganya kelaparan". Dan tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi". demikian peringatan beliau. Demikian juga dengan ibadah qurban, qurban adalah salah satu ibadah yang bernilai sosial. Kita diperintahkan untuk membagikan sebagian dari daging qurban kita kepada fakir miskin, sementara sebagian fakir miskin ada daerah-daerah pelosok. Akan tetapi kadang kita merasa sayang jika hewan qurban kita tidak disembelih di kampung kita sendiri. Sementara banyak saudara kita di daerah lain tidak merayakan hari raya idul adha karena tidak ada yang berqurban.

Pada Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijah 1444 H atau pada tanggal 28 Juni 2023 Pelaksanaan Hewan Qurban oleh pegawai muslim BPK Perwakilan



Provinsi Kalimantan Barat. Pada Qurban tahun ini penyembelihan Hewan Qurban yang dilakukan dikantor yaitu berjumlah sebanyak 2 ekor Sapi dan 1 ekor Kambing.

Penyembelihan Hewan Qurban yang dilakukan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan kegiatan tahunan kantor BPK dalam hal ini guna untuk memudahkan para pegawai yang hendak berqurban. Kegiatan penyembelihan qurban ini bertempat di halaman Masjid kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan dimulainya lantunan takbir. Adapun paket yang akan dibagikan ialah sebanyak 240 paket untuk daging Sapi dan 10 Paket untuk daging Kambing, jadi total yang dibagikan ialah sebanyak 250 paket.

BPK Kalbar Serahkan LHP LKPD TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, Melawi dan Kota Singkawang

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menyerahkan Laporan Hasil



Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, Melawi dan Kota Singkawang di Aula BPK Kalbar. Acara dilakukan secara langsung dengan mengundang Ketua DPRD dan Kepala Daerah dari masing-masing Pemerintah Daerah. Penyerahan laporan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, **Wahyu Priyono** didampingi oleh Kepala Sub Auditorat Kalbar I, **Yudi Prawiratman**, Kepala Sub Auditorat Kalbar II, **R.M. Heribertus Kurniawan**, dan Kepala Sekretariat Perwakilan, **Maksum**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, Melawi dan Kota Singkawang telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, sehingga BPK memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP".



Dasar Hukum BPK



BPK Kalbar serahkan LHP LKPD TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kayong Utara, Bengkayang dan Mempawah



Pada 16 Mei 2023, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menyerahkan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kayong Utara, Bengkayang dan Mempawah di Aula BPK Kalbar. Penyerahan laporan langsung oleh Kepala Perwakilan, **Wahyu Priyono** didampingi oleh Kepala Sub Auditorat Kalbar I, **Yudi Prawiratman**, Kepala Sub Auditorat Kalbar II, **R.M. Heribertus Kurniawan**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang telah dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), maka BPK berpendapat bahwa :

1. Kabupaten Mempawah adalah "WTP"
 2. Posisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau 21 Desember 2022 disajikan secara wajar, sehingga berhak mendapatkan Opini "WTP".
 3. Kabupaten Kayong Utara menyajikan laporan posisi keuangan secara wajar, opini yang diberikan adalah "WTP"
- Atas posisi keuangan, Kabupaten Bengkayang juga mendapatkan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atau "WTP"



Penyerahan LHP LKPD TA 2022 pada Pemerintah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sintang, Landak, dan Kapuas Hulu



Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 pada Pemerintah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Kapuas Hulu di Aula BPK Kalbar pada 12 Mei 2023. Penyerahan laporan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, **Wahyu Priyono** kepada Para Pimpinan DPRD dan Para Kepala Daerah masing-masing Pemerintah Daerah. Turut hadir dalam acara penyerahan LHP ini yaitu Kepala Sub Auditorat Kalbar I, **Yudi Prawiratman**, Kepala Sub Auditorat Kalbar II, **R.M. Heribertus Kurniawan**, dan Kepala Sekretariat Perwakilan, **Maksum**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Kapuas Hulu telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, sehingga BPK memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP".



Visi dan Misi BPK RI

VISI

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola

MISI

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan

TUJUAN

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

NILAI-NILAI DASAR

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

Integritas: Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan..

Independensi: Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Profesionalisme: Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

BUDAYA KERJA "TEGAS"

"TEGAS" merupakan budaya kerja yang selalu dijunjung BPK Perwakilan Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab baik pengelolaan maupun pemeriksaan keuangan negara.

Trust

Membangun kepercayaan publik dengan mengedepankan kualitas laporan hasil pemeriksaan dengan menjunjung tinggi IIP dengan Konsisten.

Educate

Meningkatkan pemahaman melalui edukasi tentang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang bersih dan transparan kepada stakeholder

Good Governance

Terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung keterbukaan informasi publik

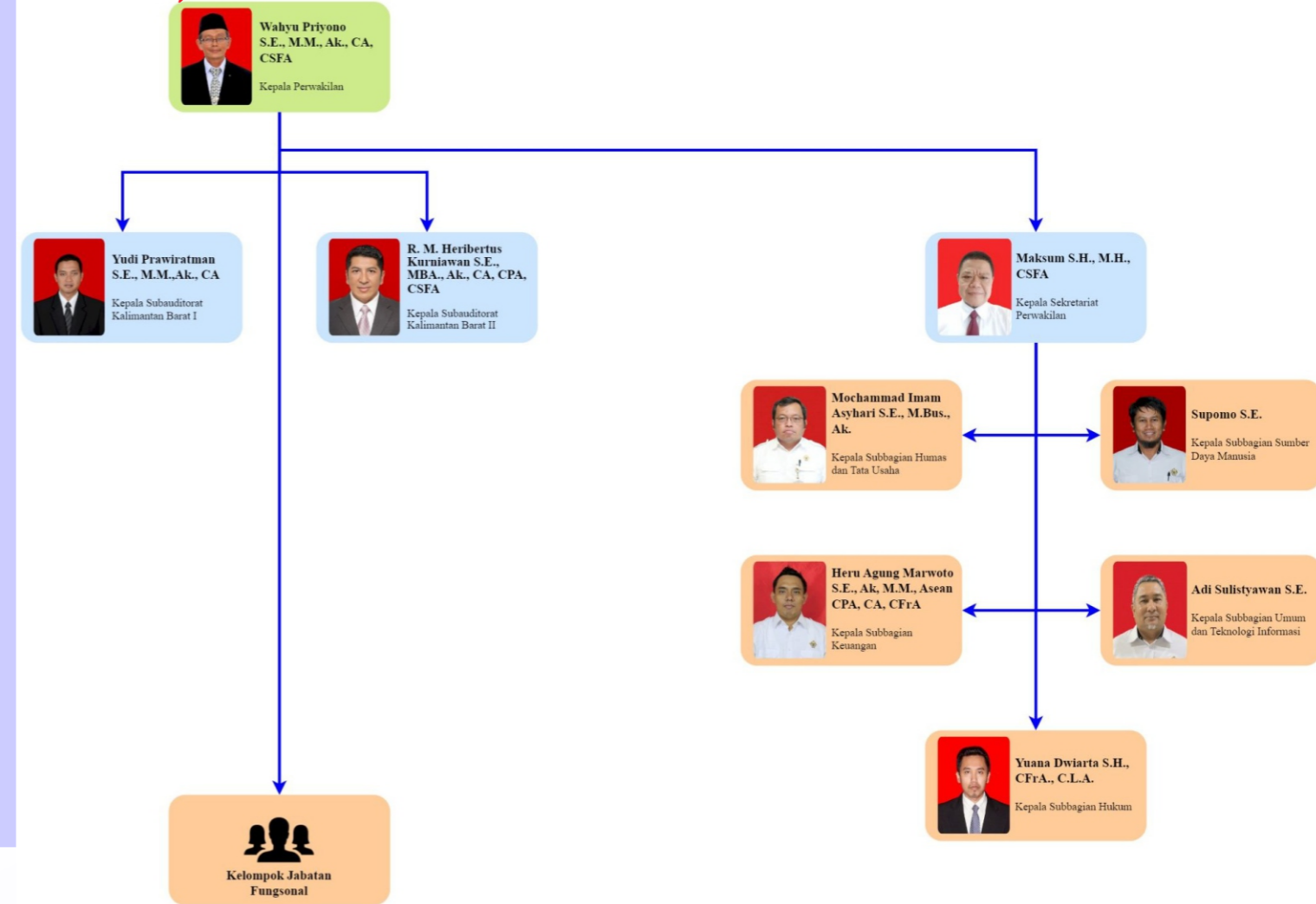
Accountable

Bekerja secara profesional, transparan, dan objektif

Synergy

Membangun kerjasama secara aktif dengan stakeholder dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah

Struktur Organisasi



Opini Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil pemeriksaan BPK Kalimantan Barat atas 15 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat selama empat tahun terakhir menunjukkan terdapat peningkatan Opini WTP yaitu pada Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2022, terdapat 1 (satu) entitas memperoleh opini WTP. Perkembangan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2022

No	Entitas Pemda	2020	2021	2022	2023
1	Provinsi Kalimantan Barat	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Pontianak	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Mempawah	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Sintang	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Ketapang	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Sambas	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kota Singkawang	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Kubu Raya	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Sekadau	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Sanggau	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Landak	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kapuas Hulu	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Melawi	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Kayong Utara	WDP	WDP	WTP	WTP
15	Kab. Bengkayang	WDP	WDP	WDP	WTP